

1. LATAR BELAKANG

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik dan sifat diantaranya (1) melalui sumberdaya yang diperoleh dari sumbangan yang tidak mengharapkan imbalan, (2) menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan memupuk laba, walaupun ada laba, maka tidak pernah dibagikan kepada pendiri/pemilik entitas, (3) kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus kembali, dan (4) kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumberdaya saat likuidasi.

Karakter dan tujuan organisasi nirlaba menjadi jelas terlihat perbedaannya ketika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi bisnis sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia.

Organisasi nirlaba sebagai wujud dari organisasi masyarakat yang berangkat dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat itu sendiri dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepentingan pengguna laporan adalah untuk menilai jasa organisasi dan kemampuan *going concern* dan menilai cara manajer melaksanakan tanggungjawab dan aspek kinerja manajer. Selain itu dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan transparan memberikan kemudahan manajer untuk membuat suatu pertanggungjawaban kepada pengguna laporan.

Menurut Setiawan (2007) organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, ... rumah sakit dan klinik publik, organisasi politik, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Salah satu bentuk organisasi nirlaba dengan tipe amal adalah Gereja. Gereja dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumberdaya untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota (jemaat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan. Dilihat dari badan

hukumnya, Gereja merupakan Yayasan Gerejawi karena didirikan berdasarkan Surat Pendirian Gereja.

Keterbukaan laporan keuangan Gereja sangatlah penting sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas, dan dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan umat yang telah memberikan amalnya kepada Gereja untuk mengelola dana tersebut. Dampak suatu penyajian pelaporan keuangan yang tidak faktual dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu kehilangan kepercayaan. Hal ini merupakan kerugian terbesar yang dihadapi sebuah organisasi, baik dalam hal kegiatan di masyarakat maupun proses pertanggungjawaban keuangan ke lembaga donor.

Tuntutan akan akuntabilitas memadai, untuk organisasi nirlaba khususnya Gereja bukanlah hal yang mudah, sering kali bendahara Gereja adalah seseorang yang punya pengalaman dalam bidang akuntansi bisnis, tapi tidak memiliki pelatihan/ketrampilan khusus dalam akuntansi Gereja. Pengurus Gereja mengharapkan bendahara atau sekretaris keuangan Gereja untuk menangani keuangan secara layak, meskipun mereka mungkin memiliki sedikit pengetahuan dalam akuntansi.

Adanya bermacam tuntutan bentuk laporan keuangan tersebut seharusnya tidak menghalangi penerapan standar umum yang berlaku di Indonesia. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah mengakomodir hal tersebut dengan menerbitkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sesuai dengan PSAK tersebut, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan Gereja Kristen, terutama pengelolaan keuangan dan akuntabilitasnya. Selain itu, membahas tentang bentuk laporan keuangan Gereja Kristen yang tepat disesuaikan dengan PSAK 45.

2. POKOK BAHASAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok bahasan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: “Bagaimana seharusnya bentuk laporan keuangan Gereja Kristen yang tepat sesuai dengan PSAK 45?”

3. TUJUAN PEMBAHASAN

1. Mendeskripsikan laporan keuangan sesuai PSAK 45.
2. Mendeskripsikan laporan keuangan Gereja Kristen secara transparan.

4. KAJIAN LITERATUR

4.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2007) di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya terdapat beberapa kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangannya. Diantaranya struktur organisasi dan pencatatan akuntansi. Dalam struktur organisasinya, Gereja ini mempunyai susunan pengurus Gereja yang disebut dengan susunan Personalia Majelis Jemaat Gereja. Susunan pengurus ini terdiri dari pelayan harian majelis jemaat, badan-badan pembantu, dan pembantu umum serta karyawan Gereja. Dalam susunan pengurus pelayan harian majelis jemaat, disebutkan ada Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III, dll. Disini tidak dijelaskan fungsi atau tugas yang dibebankan kepada Bendahara I sampai Bendahara III. Fungsi atau tanggung jawab harus diketahui supaya memenuhi kebutuhan setiap kegiatan pelayanan yang sudah diprogramkan dan kebutuhan tiap unit-unit fungsi pelayanan yang sudah ditetapkan.

Kelemahan dalam pencatatan akuntansi dalam Gereja terdapat terletak pada tugas dan tanggung jawab karyawan Gereja bidang urusan keuangan jemaat yang bertugas mencatat semua transaksi dalam Gereja dalam sehari-hari, menerima semua bukti-bukti transaksi baik kas masuk maupun kas keluar, mengeluarkan *cash* bon dimana *cash* bon tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus Gereja/komisi maksimal dua minggu setelah acara berlangsung, dan membuat laporan keuangan per mingguan ditujukan kepada Majelis Jemaat

untuk evaluasi di Rapat Pelayanan Harian Majelis Jemaat (PHMJ). Hal inilah yang membuat tugas seorang karyawan bidang keuangan sangat berat karena hanya satu orang yang ditugasi, apabila ada kesalahan pencatatan akibat kelalaian, akan membuat kesalahan yang fatal dalam membuat rencana anggaran selanjutnya akan terganggu. Maka sangat dibutuhkan seorang karyawan yang bisa menggantikan serta membantu jika salah satu karyawannya tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Pencatatan akuntansi tersebut dicatat dalam laporan keuangan mingguan dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh bendahara yang akan dibuahkan laporan keuangan tahunan.

Berikut ini contoh dari laporan keuangan mingguan Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya:

Gambar 1
Laporan Keuangan Mingguan

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN				
Dari : Bendahara GKJW Jemaat Surabaya				
Kepada : PHMJ GKJW Jemaat Surabaya				
Periode :				
Pasal	Mata Anggaran	Menurut	Realisasi	Realisasi s/d
		Anggaran	Minggu ini	Minggu ini
Jumlah				

Sumber: Sakti (2007)

Setelah menerima laporan mingguan dari karyawan bidang urusan keuangan jemaat, bendahara bertugas menindaklanjuti laporan keuangan tersebut untuk disampaikan kepada jemaat serta membuat laporan keuangan secara umum

yaitu laporan keuangan tahunan. Laporan ini yang disampaikan kepada jemaat gereja melalui warta jemaat setiap minggunya

Berikut ini adalah contoh dari laporan tahunan yang dibuat oleh bendahara:

Gambar 2
Laporan Keuangan Tahunan

LAPORAN KEUANGAN - GKJW JEMAAT SURABAYA				
PERIODE TAHUN 200X				
Pasal	Mata Anggaran	ANGGARAN	REALISASI	(%)
JUMLAH				

Sumber: Sakti (2007)

Berdasarkan laporan-laporan keuangan Gereja tersebut tidak dapat dilihat adanya hubungan dengan PSAK 45. PSAK 45 patut dipertimbangkan sebagai aturan dan petunjuk dalam membuat laporan keuangan yang benar. Tidak ada salahnya, mulai dari sekarang Gereja mulai berbenah diri dalam sistem keuangannya agar semua tujuan dari visi dan misi Gereja bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Gereja merupakan organisasi nirlaba yang bertipe amal, Gereja

dikatakan organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota jemaat Gereja dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan. Secara hukum, Gereja sebagai yayasan gerejawi menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 pasal 71 yang mengatur tentang yayasan.

Menurut Limpo (2007) dalam penelitiannya di LSM Syekh Yusuf Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan untuk proses pencatatan akuntansi keuangannya terdapat beberapa kelemahan yaitu pembuatan laporan keuangan disusun sesuai keinginan pemberi dana, dimana sudah ditentukan bentuk dan susunannya. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM juga memiliki kelemahan yang lain, ketidakjelasan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja LSM dan sangat jauh dari prinsip-prinsip akuntabilitas yang ada di PSAK 45.

Terdapat tiga laporan keuangan yang dibuat oleh LSM Syekh Yusuf pada pemberi dana sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ditujukan kepada Bappeda Tk. I Sul-Sel.
2. Nota Posisi Keuangan.
3. Buku Kas Harian.

Adapun bentuk dan susunan laporan keuangannya dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 4
Nota Posisi Keuangan

NOTA POSISI KEUANGAN				
Bulan :				
Tanggal	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah			

Sumber: Limpo (2007)

Gambar 5
Buku Kas Harian

BUKU KAS HARIAN				
Bulan :				
Tanggal	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah			

Sumber: Limpo (2007)

4.2. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Menurut PSAK No. 45

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Pernyataan ini tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen, dan unit-unit sejenis lainnya.

Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya.

Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Hal-hal yang tidak diatur dalam pernyataan standar akuntansi ini harus mengacu kepada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum.

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara

permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semuanya penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.

Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:

1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Tujuan laporan keuangan secara rinci, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
5. Usaha jasa suatu organisasi.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain.

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan terdiri dari klasifikasi aktiva dan kewajiban. Informasi mengenai likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo.
2. Mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Untuk klasifikasi aktiva bersih terikat atau tidak terikat laporan keuangannya berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Untuk perubahan kelompok aktiva bersih laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Perubahan kelompok aktiva bersih, laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.

Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No. 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini:

- a. Aktivitas pendanaan:
 1. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang;
 2. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment); dan
 3. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
- b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

4.3. Badan Hukum Yayasan dan Gereja

4.3.1. Bentuk dan Karakteristik Organisasi Yayasan

Menurut UU No. 16 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Menurut Bastian (2007:2-6) karakteristik dan sifat dari yayasan bisa dilihat dari tujuan yayasan, visi, misi, sumber pembiayaan/kekayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi yayasan, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi. Yayasan mempunyai fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan dan kemanusiaan. Setiap organisasi termasuk yayasan memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Sementara tujuan kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, koral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan.

Visi dalam yayasan dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu yayasan. Misi suatu yayasan adalah maksud khas (unik) dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya dan yang mengidentifikasi ruang lingkup operasi. Perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan (*setting*) sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik..

Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, seperti berupa: (a) Wakaf; (b) Hibah; (c) Hibah wasiat; (d) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

Dalam yayasan, pengelola (pengurus dan pengawas) bertanggung jawab kepada Pembina yang disampaikan dalam Rapat Pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban di yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban yayasan kepada pembina. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban manajemen (*managerial accountability*) merupakan bagian terpenting bagi kredibilitas manajemen di yayasan.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Pasal 2 tentang yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang tersebut atau Anggaran Dasar. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, dan pihak yang dapat diangkat jadi pengurus adalah individu yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Dilihat dari karakteristik anggaran, rencana anggaran yayasan dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yayasan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan kapan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Sistem akuntansi yang diterapkan akan berubah sebagaimana halnya dengan sumber daya dan kebutuhan yayasan. Yayasan berskala kecil yang baru berdiri hanya perlu

mempertahankan akurasi catatan aktivitas dalam buku cek. Jika jumlah transaksi berkembang, yayasan akan menambahkan pembayaran kas secara manual dan jurnal untuk transaksi penerimaan kas dengan menyiapkan laporan bulanan yang berupa ringkasan item pendapatan dan biaya. Pada sebuah yayasan, penekanan diberikan kepada penyediaan biaya data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan-yang menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*)-yaitu akuntansi pendapatan dan biaya.

4.3.2. Gereja

Gereja merupakan yayasan atau lembaga sosial yang berada di bawah organisasi Gerejawi. Awal dibentuknya Gereja dibutuhkan tata kelola organisasi (*good governance*) dan sumber daya manusia (SDM), hal ini terangkum dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga sebuah organisasi Gereja. Tiap-tiap Gereja mempunyai tata dasar dan tata rumah tangga masing-masing. Tata dasar dan tata rumah tangga merupakan sistem manajemen sebuah Gereja disesuaikan dengan ketentuan undang-undang, yaitu Undang Undang No 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang Yayasan. Dengan mengacu pada Pasal 71 UU No 28 tahun 2004, maka bagi yayasan yang belum memiliki kriteria sebagai badan hukum dapat memperoleh status hukum dengan menyesuaikan anggaran dasarnya dan mengajukan permohonan ke Departemen Hukum dan HAM.

Misi merupakan hakikat dari sebuah gereja. Misi adalah segalanya tentang Gereja, orang-orang yang telah ditebus, yang dikirim atau diutus ke dunia untuk melaksanakannya. Gereja tidak dibuat untuk melakukan pekerjaan misi karena Gereja itu sendiri adalah misi. Menurut Sairin (2006), agar visi dan misi lembaga Gerejawi tetap dapat terwujud dalam pelayanan yayasan dan relasi lembaga memiliki ikatan hukum dengan yayasan, maka perlu dilakukan langkah dan upaya hukum yang cepat dan tepat sehingga yayasan dapat mewujudkan pelayanan sosial dengan baik di tengah masyarakat.

5. PEMBAHASAN

Gereja Kristen merupakan Yayasan Gerejawi, didirikan berdasarkan Surat Pendirian Gereja dan didaftarkan secara hukum serta disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Pasal 71 yang mengatur tentang yayasan. Dalam Gereja Kristen terdapat sebuah rumusan atau aturan tertulis mengenai tata dasar dan tata rumah tangga yang disusun oleh rapat majelis sidang. Setiap Gereja Kristen memiliki tata dasar Gereja yang berbeda pula tergantung pada kondisi dan situasi Gereja itu sendiri. Tata dasar Gereja merupakan suatu landasan berorganisasi Gereja, yang meliputi beberapa hal mendasar diantaranya nama, tempat kedudukan dan waktu, pengakuan iman, azas, tujuan, usaha, keanggotaan, bentuk pemerintahan Gerejawi dan struktur, persidangan, perbendaharaan, kerjasama dan penerimaan anggota, serta perubahan dan pengesahan tata dasar.

Dalam tata dasar Gereja khususnya untuk perbendaharaan memuat sumber pembiayaan Gereja dan pertanggungjawaban sumber pembiayaan tersebut. Menurut Wehantouw (1995:6) sumber pembiayaannya berupa: persembahan mingguan (kolekte hari minggu), persembahan bulanan (perpuluhan), persembahan khusus, persembahan lain-lain yang tidak mengikat, penerimaan hibah, penerimaan bantuan dari dalam dan luar negeri, serta pemerintah. Adapula sumber-sumber pembiayaan lain, seperti gedung yang dapat disewakan, mobil yang disewakan, dan lain-lain. Pengelolaan keuangan Gereja dipegang di bawah Gereja yang ditetapkan dan diatur berdasarkan keputusan majelis jemaat dan majelis sinode. Pertanggungjawaban mengenai keuangan Gereja secara berkala dilaporkan oleh bendahara Gereja kepada majelis jemaat dan sinode.

Menurut Mardiasmo (2004:20) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : "Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, ... Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas". Pola pertanggungjawaban Gereja Kristen sama dengan yayasan pada umumnya yang bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban

bendahara kepada majelis jemaat dan sinode. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban ke masyarakat luas seperti jemaat-jemaat Gereja tersebut. Struktur Gereja Kristen ada beberapa macam dilihat dari kebutuhan dan wilayah cakupan yang dimiliki, seperti Sinode, Wilayah, dan Jemaat. Untuk mengatur dan menjalankan tugas-tugas kemajelis jemaat, struktur organisasinya terdiri dari Ketua Jemaat/Gembala Jemaat, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Bendahara. Dalam melaksanakan tugas lebih khusus, dibentuk dua koordinator diantaranya koordinator diakonia (pelayanan yang bersifat sosial, seperti pelayanan sosial jemaat, saran dan prasarana, aset dan rumah tangga), koordinator koinonia (pelayanan yang bersifat persekutuan kategorial jemaat, dan pelayanan musik). Kedua hal tersebut juga disesuaikan dengan keperluan jemaat.

5.1. Administrasi Keuangan Gereja

Kegiatan administrasi keuangan Gereja meliputi pembuatan anggaran belanja dan pendapatan Gereja. Anggaran ini diperlukan, agar Gereja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan teratur dan terencana. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah meneliti pekerjaan apa yang harus dikerjakan, dan baru kemudian dana untuk membayar pekerjaan itu. Anggaran ini dibuat dengan cermat dan kemudian disampaikan kepada anggota jemaat, dengan maksud untuk memberitahukan kepada mereka apa yang Gereja butuhkan dalam pekerjaannya itu. Dengan cara begitu jemaat diikutsertakan secara aktif dan bertanggungjawab dalam keseluruhan pelayanan Gereja.

Gereja Kristen membuat rencana anggaran pemasukan dan pengeluaran Gereja selama satu tahun kedepan. Gereja juga merencanakan program-programnya, baik jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah ditentukan oleh rapat sinode yang diadakan setiap setahun sekali.

Sumber dana atau pendapatan Gereja Kristen adalah persembahan jemaat setiap minggunya. Sumber keuangan Gereja Kristen dikelompokkan kedalam lima kategori atau jenis sumber yaitu:

- Persembahan persepuluhan,
- Persembahan umum atau kolekte,

- Persembahan khusus,
- Penghasilan usaha, dan
- Sumbangan lain-lain.

Untuk administrasi keuangan Gereja Kristen biasanya dibedakan berdasarkan pemanfaatannya seperti kas jemaat. Kas jemaat merupakan keseluruhan dana dari jemaat yang terkumpul tiap minggunya, dimana dana tersebut dikelola oleh pengurus Gereja untuk membiayai program Gereja yang telah ditetapkan. Pencatatan keuangan kas jemaat terkait dengan kegiatan program kerja tahunan, terdiri dari:

- Pengeluaran rutin,
- Biaya kerja rutin,
- Pengeluaran pembangunan, dan
- Dana persekutuan.

Kas jemaat secara keseluruhan disimpan dalam bentuk tabungan dipegang oleh pengurus yaitu bendahara Gereja, sedangkan kas kecil yang memang dipersiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan gereja sehari-hari dikelola oleh bagian administrasi keuangan jemaat. Sedangkan uang untuk program kerja merupakan dana yang dipersiapkan untuk membiayai kegiatan/program kerja yang sedang atau akan dilaksanakan di mana nantinya akan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai kepada bagian administrasi keuangan.

Sistem akuntansi dalam Gereja Kristen di mulai dari program kerja tahunan, di dalam program kerja tersebut tidak hanya anggaran penerimaan saja, tetapi juga anggaran pengeluaran Gereja selama satu tahun berjalan. Pengeluaran Gereja selama satu tahun dapat dibagi menjadi :

- Pengeluaran rutin, dalam Gereja terbagi atas jaminan tenaga kerja, pengobatan, rapat-rapat, ongkos jalan, dan lain-lain.
- Biaya kerja rutin, antara lain keperluan katekisasi, keperluan teologi, keperluan musik gereja, dan keperluan pelayanan lainnya yang telah masuk dalam program kerja.

- Pengeluaran pembangunan antara lain untuk keperluan kesaksian, keperluan pemuda dan remaja, keperluan peranan wanita, dan lain sebagainya.
- Dana persekutuan ke majelis wilayah dan dana persekutuan ke majelis sinode adalah persembahan dari jemaat untuk mendukung kegiatan pelayanan di majelis wilayah dan di majelis sinode.

Semua transaksi-transaksi di atas diambilkan dari dana kas jemaat. Laporan yang dibuat oleh karyawan harus dilaporkan tiap minggu, ditujukan untuk evaluasi di rapat pelayanan majelis jemaat. Dari laporan tersebut dapat diketahui berapa jumlah uang yang masuk dalam satu minggu dan berapa jumlah uang yang keluar dalam satu minggu, hal ini bisa mengetahui berapa persen program yang sudah terlaksana dan bisa mengontrol keuangan dalam Gereja. Hasil akhirnya nanti akan direkapitulasikan. Dari rekapitulasi ini dapat diketahui posisi keuangan Gereja baik secara tunai maupun yang ada di bank.

Manajemen keuangan dalam Gereja pada dasarnya berdasarkan akuntansi berbasis kas karena sebagian besar transaksi dalam Gereja merupakan keluar masuk kas, dan pencatatan yang dilakukan berdasarkan waktu kas masuk dan waktu kas keluar.

Berikut ini contoh laporan keuangan mingguan dan tahunan Gereja Kristen:

Gambar 6
Laporan Keuangan Mingguan

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN				
Dari : Bendahara GKJW Jemaat Surabaya				
Kepada : PHMJ GKJW Jemaat Surabaya				
Periode :				
Pasal	Mata Anggaran	Menurut	Realisasi	Realisasi s/d
		Anggaran	Minggu ini	Minggu ini
Jumlah				

Sumber: Sakti (2007)

Gambar 7
Laporan Keuangan Tahunan

LAPORAN KEUANGAN - GKJW JEMAAT SURABAYA				
PERIODE TAHUN 200X				
Pasal	Mata Anggaran	ANGGARAN	REALISASI	(%)
JUMLAH				

Sumber: Sakti (2007)

5.2. Bentuk Laporan Keuangan Gereja dengan PSAK 45

Menurut Bastian (2007:73) pemakai laporan keuangan memiliki kepentingan bersama yaitu untuk menilai: (1) jasa dan kemampuan untuk memberikan jasa secara berkesinambungan, (2) mekanisme pertanggungjawaban dan aspek kinerja pengelola. Kemampuan dalam mengelola jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan, dimana informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut, akan disampaikan. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun yang yang tidak terikat penggunaannya.

Hal ini yang membuat laporan keuangan Gereja tidak bisa disajikan sesuai dengan PSAK 45 karena dalam mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut Gereja tidak mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di PSAK 45. Ada dua hal yang membuat laporan keuangan Gereja tidak bisa disajikan layaknya PSAK 45. Pertama, PSAK 45 jenis laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jenis laporan keuangan Gereja hanya laporan posisi keuangan saja yang mencatat pengeluaran dan pemasukan rutin yang dicatat setiap kali transaksi dan setiap minggu dilaporkan dan diwartakan kepada jemaat. Untuk laporan posisi keuangan tahunan, didapatkan dari hasil rekapan tiap minggu, ini juga diwartakan ke jemaat untuk mengetahui program-program yang sudah terealisasi dan belum terealisasi.

Kedua, dalam PSAK 45 terdapat istilah yang digunakan dalam pernyataan diantaranya pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumbangan terikat, dan sumbangan tidak terikat. Dalam laporan keuangan Gereja tidak mengenal istilah yang sudah dikelompokkan tersebut.

Tetapi jika dilihat satu per satu maka kemungkinannya laporan keuangan Gereja Kristen dapat disesuaikan dengan standar PSAK 45. Pembatasan permanen dalam PSAK 45 menjelaskan pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semuanya penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Misalnya, gedung Gereja merupakan sumbangan dari donatur yang

dihibahkan juga memiliki gedung pertemuan yang bisa disewakan untuk acara pernikahan, dan lain-lain.

Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Misal, penerimaan sumbangan dari donatur berupa fasilitas akomodasi untuk kebutuhan pelayanan kategorial seperti kebaktian retreat di luar kota, penyumbang menyediakan fasilitas akomodasi untuk acara tersebut.

Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Misal, donatur menyumbang pendingin udara sebanyak 10 unit untuk Gereja. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Misal, ada kelebihan dana donatur untuk perayaan paskah sekitar Rp 5.000.000, dana ini bisa disimpan dan digunakan kembali pada perayaan natal selanjutnya.

Sumber pendapatan Gereja Kristen juga dapat disesuaikan dengan PSAK 45, diantaranya:

- Persembahan persepuluhan merupakan sepersepuluh dari penghasilan kotor usaha donatur, bisa dikategorikan sebagai sumbangan tidak terikat karena persembahan ini merupakan salah satu sumber utama keuangan Gereja. Adapun kegunaannya bisa untuk membiayai kehidupan hamba Tuhan atau Gembala Jemaat, membiayai operasional Gereja sehari-hari atau keperluan apapun yang tidak bisa dibiayai oleh persembahan khusus;
- Persembahan umum adalah persembahan di atas persepuluhan atau dikenal sebagai kolekte. Persembahan umum sama dengan persembahan persepuluhan dikategorikan sebagai sumbangan tidak terikat karena persembahan ini tidak untuk digunakan tujuan tertentu;
- Persembahan khusus adalah persembahan yang tertuju pada suatu tujuan tertentu seperti kolekte sekolah minggu, dana pembangunan Gereja, persembahan penginjilan, diakonia, dan sebagainya. Dimasukkan dalam kategori sebagai sumbangan terikat;

- Penghasilan usaha merupakan penghasilan dari upaya-upaya pengumpulan dana seperti jualan makanan, kaos, dsb. Ada juga bidang usaha atau bisnis “non-profit” atau bersifat sosial seperti sekolah, rumah sakit, toko buku, dsb. Penghasilan usaha ini dapat dikategorikan sebagai pembatasan permanen karena dana dari bidang-bidang usaha ini merupakan usaha resmi dan rutin dari Gereja, dananya juga digunakan untuk tujuan tertentu; dan
- Sumbangan lain-lain seperti sponsorship, dsb. Sumbangan ini biasanya berasal dari luar Gereja dikategorikan pembatasan sebagai permanen dan pembatasan temporer, tergantung pada penyumbang atau donaturnya dan untuk tujuan tertentu saja.

Jika dilihat dari kemungkinan laporan keuangan Gereja dapat disesuaikan dengan PSAK 45 maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui unsur-unsur dalam sistem akuntansi seperti buku cek, jurnal, dan buku besar serta serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan untuk karyawan Gereja, sukarelawan dari luar yayasan. Tujuan sistem akuntansi untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi serta laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu. Komponen-komponen dalam sistem akuntansi tersebut dalam bagan perkiraan/akun atau daftar masing-masing item di mana pencatatannya dibagi ke dalam lima kategori yaitu aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan, dan belanja. Untuk buku besar mengklasifikasikan informasi pencatatan, dimana bagan akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Dalam sistem manual ringkasan total dari seluruh jurnal dimasukkan ke dalam buku besar setiap bulannya di mana hal ini dilakukan selama satu tahun dan dilaporkan pada tanggal neraca. Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi, sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Jurnal mengatur secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Contohnya adalah:

- Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas

Keperluan katekisasi xxxx

Kas

xxxx

- Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas

Kas		xxxx
	Persembahan umum/kolekte	xxxx
- Jurnal untuk mencatat transaksi gaji

Gaji Hamba Tuhan		xxxx
	Kas	xxxx

Proses transfer informasi dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Untuk mempertahankan integritas sistem akuntansi adalah membuat neraca saldo dan rekonsiliasi bank. Neraca saldo merupakan seluruh saldo buku besar dihitung atas basis bulanan untuk memastikan bahwa total debet sama dengan total kredit. Rekonsiliasi bank merupakan perbandingan antara buku besar dengan saldo yang ada di bank, penyesuaian biaya bank dan bunga bank yang dihasilkan dengan saldo buku besar.

Dalam laporan posisi keuangan Gereja terdapat bagan akun yang sederhana sesuai dengan urutan standar PSAK 45 yaitu aktiva yang merupakan item nyata dari Gereja di mana sumber daya, termasuk kas, perlengkapan, dan kekayaan diungkapkan. Utang adalah kewajiban ke kreditor seperti pinjaman dan utang usaha. Utang yang jatuh temponya sekarang dicantumkan lebih awal dibanding utang yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya seperti utang pajak. Aktiva bersih merupakan nilai keuangan dari Gereja, aktiva tersebut merupakan saldo yang ada setelah kewajiban Gereja dilunasi. Di gereja terdapat penyusutan dilihat dari pembelian peralatan dan kekayaan substansial yang bersifat jangka panjang, karena jenis aktiva tersebut menanggung biaya per tahun sesuai dengan umur manfaatnya. Sebagai contoh, Geeja membeli komputer yang memiliki umur manfaat empat tahun sebesar Rp 2.500. ketika pembelian dicatat, jurnalnya adalah:

Aktiva Tetap		Rp2.500
	Kas	Rp2.500

Pada akhir tahun keempat, jurnalnya adalah:

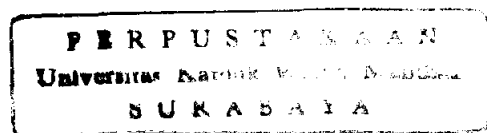
Biaya penyusutan

(Rp2.500/4tahun = Rp 625) Rp625

 Akumulasi Penyusutan Rp625

Perlakuan atas pencatatan sangat penting karena kas untuk membeli komputer dibelanjakan pada tahun pertama. Namun, seperempat pengeluaran untuk membeli computer itu tampak dalam laporan aktivitas selama empat tahun. Oleh karena itu, dalam tiga tahun, biaya penyusutan sebesar Rp625 selalu ada dalam laporan keuangan meskipun tanpa pengeluaran kas. Sebagian besar Gereja menanggung jumlah pengeluaran untuk penyusutan yang sama pada masing-masing tahun umur manfaat aktiva, biasanya disebut dengan penyusutan garis lurus. Dalam menghitung biaya penyusutan per aktiva tetap, diperlukan banyaknya biaya aktiva (termasuk seluruh biaya yang diperlukan untuk mengoperasionalkan aktiva), seberapa lama aktiva itu dapat diharapkan secara layak memberikan manfaat sebelum diganti. Perlakuan atas barang-barang seperti komputer, kendaraan, gedung, dan aktiva tetap lainnya memerlukan karyawan yang andal dalam bidang keuangan dalam memperkirakan nilai manfaat.

Tujuan laporan keuangan Gereja untuk menyediakan informasi yang paling relevan, dan yang paling mudah dipahami dari sudut pandang penyumbang, kreditor, dan pemakai laporan keuangan di luar Gereja. Berikut ini merupakan contoh bentuk laporan keuangan Gereja yang disajikan sesuai dengan PSAK 45:



GAMBAR 8
LAPORAN POSISI KEUANGAN

GEREJA KRISTEN			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
PERIODE:.....			
Aktiva			
Kas	xxx		
Deposito	xxx		
Bunga Tabungan	xxx		
Jumlah Aktiva			xxx
Kewajiban			
Utang Usaha	xxx		
Kewajiban Tahunan	xxx		
Jumlah Kewajiban		xxx	
Aktiva Bersih			
Tidak Terikat	xxx		
Terikat Temporer	xxx		
Terikat Permanen	xxx		
Jumlah Aktiva Bersih		xxx	
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih			xxx

Sumber: PSAK 45 (2002)

GAMBAR 9
LAPORAN AKTIVITAS

GEREJA KRISTEN			
LAPORAN AKTIVITAS			
PERIODE:.....			
Penerimaan Aktiva Bersih Tidak Terikat			
Persembahan Persepuluhan	xxx		
Persembahan Umum			xxx
Persembahan Khusus			xxx
Penghasilan Usaha	xxx		
Sumbangan Lain-Lain			xxx
Jumlah Penerimaan Aktiva Bersih Tidak Terikat			xxx
Beban Aktiva Bersih Tidak Terikat			
Pengeluaran Rutin			xxx
Biaya Kerja Rutin			xxx
Pengeluaran Pembangunan	xxx		
Dana Persekutuan			xxx
Jumlah Beban Aktiva Bersih Tidak Terikat			xxx
Kenaikan Jumlah Aktiva Bersih Tidak Terikat			xxx

Sumber: PSAK 45 (2002)

GAMBAR 10
LAPORAN ARUS KAS

GEREJA KRISTEN	
LAPORAN ARUS KAS	
PERIODE:.....	
<u>Arus Kas Operasional</u>	
- Pendapatan Bersih setelah dikurangi pajak	xxx
- Penyusutan	xxx
- Tambahan Piutang Usaha	xxx
- Tambahan Inventory (Persediaan)	xxx
- Pengurangan Utang Usaha	xxx
- Tambahan Beban yang Masih Harus Dibayar	<u>xxx</u>
Total Arus Kas Operasional	xxx
<u>Arus Kas Investasi</u>	
- Pembelian Peralatan	<u>xxx</u>
Total Arus Kas Investasi	xxx
<u>Arus Kas Pembiayaan</u>	
- Tambahan Pinjaman	<u>xxx</u>
Total Arus Kas Pembiayaan	xxx
TOTAL ARUS KAS	xxx
Kas pada awal periode	<u>xxx</u>
Kas pada akhir periode	xxx

Sumber: PSAK 45 (2002)

6. SIMPULAN

Gereja Kristen mempunyai peraturan organisasi yang jelas tertuang dalam Tata Dasar Gereja karena disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 28 tentang Yayasan. Selain tata organisasi yang jelas, Gereja Kristen juga mengelola administrasi keuangannya dengan sederhana karena Gereja Kristen tidak memiliki pemahaman mengenai manajemen keuangan yang berlaku serta kurangnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh karyawan atau bendahara Gereja. Hal ini yang membuat bentuk laporan keuangan Gereja Kristen yang ada belum memenuhi standar PSAK 45 sehingga menyulitkan para donatur atau penyumbang serta jemaat mengetahui posisi keuangan yang ada dalam Gereja.

Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan hanya berdasarkan apa yang terjadi saat itu, baik penerimaan serta pengeluaran, dan dilaporkan tiap minggu lewat warta jemaat agar jemaat bisa melihat kondisi keuangan secara transparan.

Bentuk laporan keuangan Gereja Kristen secara keseluruhan tidak bisa disajikan sesuai dengan PSAK 45 karena dalam mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut Gereja Kristen tidak mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di PSAK 45, baik jenis laporannya serta istilah yang digunakan dalam pernyataannya.

Kemungkinan bentuk laporan keuangan Gereja Kristen dapat disesuaikan dengan standar PSAK 45 jika dijabarkan sumber pembiayaan Gereja atau sumber pendapatan Gerejanya satu per satu maka hal ini bisa memenuhi salah satu unsur yang ada dalam PSAK 45. Tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat Gereja Kristen bisa menyesuaikan bentuk laporan keuangannya dengan standar PSAK 45 yang berlaku, hal ini sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh Gereja Kristen untuk lebih memahami ilmu akuntansi yang sudah berkembang sangat pesat saat ini. Diharapkan di masa yang akan datang Gereja Kristen memiliki bentuk laporan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, (2007), *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, Jakarta: Erlangga:2-6,73.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2002), *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Limpo, Hamzah, (2007), Studi Pencatatan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada LSM Syekh Yusuf Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Konferensi Penelitian, Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pertama, Pascasarjaan UPNV Jatim, Surabaya, 25-26 April, 2007.
- Mardiasmo (2004), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi:20.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Pasal 1-2 Tentang Yayasan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Pasal 71 Tentang Yayasan.
- Sairin, Weinata, (2006), Lintas Berita: Yayasan Gereja Diminta Sesuaikan dengan UU No. 28/2004, 25 November, 2008, <http://www.glorianet.org/berita/b6377.html>.
- Sakti, Wulan Panca, (2007), Studi tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Pada Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Surabaya, Konferensi Penelitian, Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pertama, Pascasarjaan UPNV Jatim, Surabaya, 25-26 April, 2007.
- Setiawan, Komang Adi, (2007), Mengelola Organisasi Nonprofit, 10 Februari, 2009, <http://komangadi.wordpress.com/2007/11/22/mengelola-organisasi-nonprofit/>.
- Wehantouw, Joopie A.L.H., STh., M.Div., (1995), Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Kristen Injili di Indonesia, 13-16 Juni, 1995, hal. 6.